KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bamsoet Semangati Swasta Ikut Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bamsoet Semangati Swasta Ikut Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi



Bambang Soesatyo

KETUA DPR Bambang Soesatyo menegaskan, upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional tak cukup mengandalkan pengeluaran pada sektor publik. Menurutnya, peran pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, diperlukan untuk melakukan penanaman modal.

"Investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian suatu negara. Melalui investasi akan tersedia berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Bamsoet pun menekankan pentingnya penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam pertumbuhan ekonomi. Sebab, iklim investasi yang kondusif akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

"Berdasarkan data yang dirilis World Bank, indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) Indonesia tahun 2018 berada pada peringkat ke-73. Secara total, nilai EODB Indonesia naik 1,42 poin menjadi 67,96. Indikator yang menyumbang kenaikan nilai bagi Indonesia adalah indikator memulai usaha, memperoleh kredit dan pendaftaran properti," tutur dia.

Namun demikian, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, tahun 2018 merupakan tahun yang berat bagi iklim investasi Indonesia. Nilai realisasi penanaman modal atau investasi asing di Indonesia sekitar Rp 392,7 triliun, turun 8,8 persen dibandingkan tahun 2017.

"Turunnya nilai investasi asing Indonesia di tahun 2018 diakibatkan oleh gejolak nilai tukar rupiah, serta perang dagang di pasar global. Tapi, bila dilihat secara historis, iklim investasi Indonesia memiliki lima kendala utama yang kerap dikeluhkan oleh investor. Kendala tersebut adalah tumpang tindihnya regulasi dan ketidakpastian hukum, pajak, tenaga kerja, perizinan, serta infrastruktur," jelasnya.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah menjelaskan, pemerintah telah bekerja keras membuat kebijakan dan terus berupaya untuk meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi. Antara lain, melakukan perubahan paradigma pembangunan dari Jawa centris menjadi Indonesia centris melalui pembangunan infrastruktur yang masif dan merata, pemberian fasilitas fiskal, dan melakukan reformasi di bidang perizinan.

"Mengubah sikap mental dan budaya birokrasi tak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus. Dalam berbagai kesempatan, DPR tidak henti-henti melakukan pengawasan kepada pemerintah mengenai pentingnya mengatasi defisit transaksi perdagangan dengan memperbaiki berbagai regulasi dan iklim investasi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," tandasnya. ■ ONI